

**TANGGAPAN BP TERHADAP LAPORAN KETIGA
TIM PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH (TIAP)
MENGENAI OPERASI DAN PROYEK KILANG 3 TANGGUH**

JUNI 2020

Daftar Isi

Daftar Singkatan	3
Pendahuluan	4
Tentang Proyek Tangguh LNG	4
Update eksternal	5
Rekomendasi TIAP dan respon BP	6

Daftar Singkatan

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CSTS	Chiyoda, Saipem, Tripatra, and Suluh Ardi – konsorsium untuk EPC proyek pengembangan Tangguh
EPC	Engineering, procurement, and construction
GTP	Gas to power
ICBS	Integrated community-based security (Keamanan terintegrasi berbasis masyarakat)
IEDP	Indigenous enterprise development programme (Program pengembangan kewirausahaan masyarakat asli)
IHT	In-house human rights training (Pelatihan internal terkait Hak Asasi Manusia)
JUKLAP	Petunjuk lapangan
LNG	Liquefied natural gas (gas cair alam)
Mmscfd	Million metric standard cubic feet per day
MOU	Memorandum of understanding (perjanjian kerjasama)
MRP	Majelis Rakyat Papua
NSH	North shore housing (program restorasi perumahan wilayah utara)
Perdasus	Peraturan daerah khusus
PLN	Perusahaan listrik negara
PGN	Perusahaan gas negara
Polda	Kepolisian daerah
Polres	Kepolisian resor
Polsek	Kepolisian sector
RUPTL	Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
RUKN	Rencana Umum Kelistrikan Nasional
Puskesmas	Pusat kesehatan masyarakat
SKK Migas	Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
TEP	Tangguh expansion project
TNI	Tentara nasional indonesia

Pendahuluan

BP menyampaikan terimakasih kepada Panel Penasehat Independen Tangguh (TIAP) atas laporan komprehensif dan analisis ahli, tantangan serta berbagai masukan yang diberikan TIAP. Rekomendasi yang diberikan oleh TIAP saat ini telah membantu upaya yang dilakukan oleh Tangguh untuk memastikan kesuksesannya bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan Tangguh dalam mengelola berbagai tantangan dan isu social, ekonomi dan lingkungan. TIAP juga membantu kami untuk memastikan bahwa Tangguh LNG memberikan manfaat bagi BP, masyarakat sekitar, pemerintah, karyawan, pelanggan dan juga investor.

Kunjungan TIAP terakhir dilakukan dari 13 sampai 24 Januari 2020 dan laporannya dikeluarkan pada bulan Juli 2020. Kunjungan dilakukan sebelum pandemic COVID 19 yang juga mempengaruhi operasi Tangguh dan proyek, yang mengimplementasikan protocol kesehatan yang sangat ketat serta pengurangan jumlah tenaga kerja di dalam site pada pertengahan Mei 2020. TIAP melihat dan merasakan kompleksitas dari kegiatan yang berkesinambungan dari operasi Tangguh dan juga proyek Train 3.

TIAP difokuskan terutama pada isu keamanan, HAM, tata kelola dan pengelolaan bagi hasil. Namun TIAP juga melihat berbagai isu non komersial lainnya, termasuk pelaksanaan komitmen sosial Tangguh. Laporan TIAP melengkapi review yang dilakukan oleh tim eksternal panel/*lenders consultant* sebagai perwakilan dari *Tangguh Lenders Group*.

Kami sangat mengapresiasi berbagai rekomendasi yang tertuang dalam laporan komprehensif ini. Hal tersebut sangat jelas akan membantu kami untuk terus mengelola secara tepat seluruh risiko dan tantangan yang akan kami hadapi dalam mengoperasikan Tangguh dalam jangka Panjang, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan terhadap masyarakat setempat.

Tentang Proyek Tangguh LNG

Tangguh LNG menghasilkan dan mengekspor gas alam cair (LNG) dari tiga blok gabungan K3S yang bernama Berau, Muturi dan Wiriagar, yang berlokasi di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia atau sekitar 3,000 kilometer sebelah timur Jakarta. Tangguh adalah asset nasional yang strategis.

Gas ditemukan di Teluk Bintuni pada tahun 1994, dengan kapasitas 14 trilyun kaki kubik. Saat ini, gas diekstrak melalui sumur pada dua platform anjungan – Vorwata A dan Vorwata B- kemudian dialirkan sejauh 22 kilometer melalui pipa bawah laut ke *plant* di bagian teluk sebelah selatan. Tangguh juga menggunakan fasilitas pendukung di Distrik Babo yang terdiri dari bandara Babo, dermaga Babo dan *camp*. Fasilitas tersebut untuk mendukung kegiatan *crew-change* dan *transit* untuk pekerja yang akan ke dan dari Tangguh LNG.

Produksi pertama LNG terjadi di bulan Juni 2009, dan tanker pengiriman pertama dilakukan ke Korea Selatan sebulan kemudian. Tangguh terus memastikan pemenuhan terhadap kewajiban kontraknya, dengan kapasitas operasi sebesar 7,6 juta ton per tahun. Ada sekitar 1,000 tenaga kerja yang mengoperasikan Tangguh Train 1 dan 2, dimana 61% diantaranya adalah berasal dari Papua. Sejak produksi dimulai di 2009, lebih dari 1,100 kargo telah dikirim. Selama 2019, plan telah dioperasikan dengan selamat tanpa ada isu hubungan industry/pekerja. Tingkat kecelakaan tercatat (RIF) pada tahun 2019 adalah sebesar 0,15 atau sedikit meningkat dibandingkan 2018 (0,12). Tangguh mendapatkan penghargaan peringkat HIJAU pada audit PROPER tahun 2019. Ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut operasi Tangguh menerima penghargaan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peringkat tersebut mengindikasikan bahwa Tangguh lebih dari sekedar patuh terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.

Tangguh memiliki tujuh perjanjian pembelian dan penjualan (SPA). Hal ini termasuk mensuplai LNG ke POSCO and SK E&S Co., Ltd di Korea Selatan, Sempra LNG International LLC di Mexico, CNOOC Fujian LNG Co. Ltd di

China, dan Tohoku Electric Power Co., Inc., Chubu Electric Power Co. Inc., serta Kansai Electric Power Co. Inc. di Jepang. BP terus berupaya untuk memaksimalkan nilai dari kargo Tangguh LNG. Sejak 2010, beberapa kargo telah dialihkan dari Sempra ke pasar asia di tengah-tengah kontrak parauh waktu atau penjualan spot. Sejak 2013, Tangguh juga mengirimkan kargo ke pasar domestik, termasuk ke PLN, PGN dan Nusantara Regas sebagai pengalihan dari kargo Sempra. Hal ini merubah profil Tangguh di Indonesia sebagai penyedia energi dalam negeri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi, BP dan mitranya membangun train pengolahan LNG ketiga dan fasilitas pendukungnya. Hal ini akan meningkatkan kapasitas dari fasilitas tersebut sebesar 3,8 mtpa. Proyek ekspansi dimulai pada bulan Juli 2016, terdiri dari pengembangan *offshore* dan *onshore*. Sampai dengan April 2020, kegiatan penyelesaian engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) mencapai 98%. Kedua *platform* dari WDA dan ROA *offshore* termasuk pipa dan kabel bawah laut telah sepenuhnya dibangun. Sementara itu, kegiatan *onshore*. Mencapai 84% dari targetnya. Lebih dari 17.000 tenaga kerja telah dimobilisasi ke Tangguh site untuk mendukung kegiatan Train 3 termasuk masyarakat asli yang tinggal di sekitar proyek.

AMDAL baru telah disetujui pada bulan Juli 2014, setelah itu Tangguh mengembangkan rencana lima tahun pertamanya sebagai pelaksanaan dari komitmen AMDAL jangka Panjang. Dokumen yang bernama Program Pengembangan dan Berkelanjutan Tangguh (TSDP), telah dipublikasi pada pertengahan 2015 setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Saat ini, kami tengah memformulasikan kembali TSDP baru untuk lima tahun berikutnya, yang masih terus menekankan pada pengembangan masyarakat serta mengoptimalkan manfaat Tangguh untuk masyarakat asli. TSDP baru juga akan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID 19 terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat disekitar proyek untuk beberapa waktu kedepan.

Merespon dampak dari pandemi COVID-19 secara global, BP di Indonesia mengaktifkan tiga tingkat dari response kegawatdaruratan serta bekerjasama secara erat dengan pemerintah pusat dan daerah melalui SKKMIGAS. Hal ini sangat penting untuk memastikan operasi Tangguh tetap berjalan, serta menjamin aspek kesehatan dan keselamatan dari seluruh pekerja, sebagai prioritas tertinggi kami. Sejak Maret 2020, Tangguh telah mengelola upaya untuk menurunkan jumlah tenaga kerja baik di operasi maupun proyek Train 3 untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penularan virus di site Tangguh. Kebijakan perusahaan juga hanya mengizinkan tenaga kerja dengan peran yang sangat critical yang boleh ada di LNG site, serta mengimplementasikan upaya pencegahan yang sangat komprehensif termasuk karantina terkendali selama 14 hari untuk seluruh pekerja rota dan pengunjung. Selain itu, untuk mencegah penularan virus di masyarakat, kami menyediakan perlengkapan pelindung diri (PPE) untuk pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, serta melakukan penyemprotan disinfektan di kampung-kampung sekitar. Tangguh juga meminjamkan *helicopter* nya kepada pemerintah Teluk Bintuni untuk mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan kepada masyarakat terpencil yang tinggal di Distrik Moskona.

Update eksternal

Pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk menghentikan pandemi COVID 19, sebagai krisis kesehatan masyarakat secara global yang berkembang secara cepat menjadi krisis ekonomi dan berpotensi kepada masalah sosial.

Meskipun dengan adanya stimulus ekonomi sebesar 677 triliun rupiah (\$ 47,9 milyar), ditambah dengan realokasi anggaran untuk COVID 19 telah dibelanjakan oleh pemerintah pusat dan daerah, pertumbuhan GDP Indonesia diprediksi mendapatkan pukulan yang terberat sejak krisis keuangan asia pada tahun 1997-1998

Proyeksi dasar pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah berkisar -0,4% menjadi 2,9%, meskipun pertumbuhan lebih cenderung berkisar antara 0% dan 1%, karena berbagai langkah pembatasan

pergerakan orang dan kegiatan ekonomi telah dilaksanakan. Dengan pertumbuhan PDB 0%, lebih dari 10 juta orang diproyeksikan akan jatuh di bawah garis kemiskinan yang kira-kira sama dengan jumlah orang yang dikelola pemerintah untuk keluar dari kemiskinan sejak 2010.

Di Teluk Bintuni, agenda utama adalah menyelesaikan peraturan daerah (perda) yang akan melengkapi kebijakan mengenai Perdasus DBH yang telah disetujui di tingkat provinsi. Perdasus DBH dan kebijakan pendukungnya mengatur distribusi pendapatan DBH dari provinsi ke tingkat kabupaten, serta mengakomodir alokasi untuk masyarakat adat yang terdampak langsung dari operasi migas. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat menjawab tuntutan adat mengenai kompensasi dari kegiatan industry migas.

Pandemi juga menunda pelaksanaan pilkada dari jadwal semula tanggal 23 September menjadi 9 Desember. Bupati Petrus Kasihw dan wakil bupati Matret Kokop akan ikut kembali dalam pilkada. Seperti pilkada sebelumnya, Tangguh akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk memfasilitasi proses pemungutan suara untuk pekerja yang berdomisili di Teluk Bintuni yang ada didalam LNG site.

Rekomendasi TIAP dan respon BP

Selama kunjungan terakhir, TIAP memfokuskan perhatiannya terutama pada aspek keamanan dan HAM, pengelolaan dana bagi hasil, pengembangan tenaga kerja Papua, serta komitmen program sosial Tangguh.

BP bermaksud memberikan tanggapan secara formal atas rekomendasi yang dibuat oleh TIAP tersebut.

A. Sekuriti dan Hak Asasi Manusia

1. **Rekomendasi TIAP:** Pada saat ini ICBS telah dimodifikasi dan polisi telah ditempatkan di Tangguh ("QRF"), BP harus bekerja sama dengan polisi untuk menjamin semua personal di QRF telah menerima pelatihan HAM dari ahli perlindungan HAM yang bersertifikat. BP juga harus meyakinkan Kapolda untuk hanya menempatkan masyarakat Papua di program QRF.

Tanggapan BP: *personil yang melaksanakan QRF menerima pelatihan mengenai HAM dari ahli yang bersertifikat selama mereka mengikuti kegiatan pelatihan dasar dan advance mengenai kepolisian. Selama penugasan mereka di Tangguh, penyegaran mengenai pelatihan HAM dilakukan oleh ahli dibidang HAM menggunakan komitmen BP VPHSR dan kepolisian sebagai acuan. BP setuju untuk mendorong Kapolda agar menugaskan orang Papua, namun perlu dipertimbangkan juga bahwa Polda perlu untuk mengembangkan personil internal mereka.*

2. **Rekomendasi TIAP:** BP harus menjamin bahwa semua pengawasan dan pelaporan oleh QRF yang sesuai dengan SOP diimplementasikan secara penuh dan semua isu yang timbul dari pelaporan tersebut ditangani dengan tepat dengan pihak kepolisian dan SKK Migas.

Tanggapan BP: *Setuju, dan sudah ada beberapa kasus sejak penegakkan QRF dimana BP sebagai pelaksana ketentuan ini.*

3. **Rekomendasi TIAP:** Meskipun pelatihan gabungan tahunan tidak lagi menjadi komitmen dari pihak keamanan public, BP harus terus melakukan pelatihan tersebut bagi personel keamanannya dan secara aktif mengajak partisipasi dari Kepolisian dan TNI

Tanggapan BP: *BP dan kepolisian melaksanakan latihan secara rutin dan ujicoba dengan target tertentu untuk menanggapi ancaman keamanan secara spesifik, dimana BP sudah berkomitmen untuk hal tersebut.*

4. **Rekomendasi TIAP:** Semua petugas keamanan Tangguh harus terus menerima pelatihan HAM rutin dari ahli yang berkualitas, dan BP harus secara aktif mendorong Kepolisian dan TNI untuk menyediakan pelatihan serupa bagi personelnya yang akan bertanggung jawab terhadap kejadian di Tangguh

Tanggapan BP: *Setuju, Tangguh personil keamanan yang bersifat khusus di Tangguh dan Babo secara rutin berpartisipasi dalam pelatihan HAM termasuk pelatihan mengenai prinsip dan pedoman sukarela BP yang dikeluarkan tahun 2019. Namun sayangnya, pelatihan yang sama tidak dapat dilakukan di kepolisian dan TNI dalam beberapa bulan karena berbagai isu nasional termasuk pemilu dan kerusuhan masyarakat di Papua dan Papua Barat pada akhir tahun lalu, serta pandemi COVID 19. Jika situasi kembali normal, kami akan mendorong mereka untuk melakukan pelatihan tersebut secara mandiri.*

5. **Rekomendasi TIAP:** Sebagaimana kegiatan transportasi dan perdagangan meningkat di area sekitar Tangguh, BP harus terus meningkatkan penggunaan drones, kamera, dan teknologi lainnya untuk mengawasi dan mengamankan parameter Tangguh

Tanggapan BP: *Setuju. Tangguh berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi untuk keperluan pemantauan perbatasan yang rawan. Hal ini telah direncanakan dan berdasarkan kepada proyek infrastruktur keamanan fisik (Physical Security Infrastructure Project) kami.*

6. **Rekomendasi TIAP:** BP harus waspada terhadap partisipasinya dan dukungannya kepada FKPM, untuk memastikan bahwa forum-forum tersebut tidak mengarahkan perspektif bahwa BP membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan data atau membangun kehadiran polisi di kampung-kampung terdekat

Tanggapan BP: *Setuju, Kami akan terus melanjutkan dukungan kepada FKPM sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Kami tidak ada keinginan untuk berperan lebih aktif dan lebih jauh kehadiran kami atas kegiatan FKPM. Namun demikian, kami percaya bahwa penyediaan dukungan logistic bagi FKPM ada dalam ranah terbatas yang dapat kami penuhi terkait dengan kode etik BP serta kemandirian dari FKPM.*

7. **Rekomendasi TIAP:** Sejauh ini, koordinasi dan pengawasan keamanan dari CSTS telah berjalan dengan baik, baik dalam mencegah pekerja TEP membawa senjata atau barang terlarang lainnya ke dalam site dan dalam mengelola beberapa insiden yang telah terjadi. Kesuksesan ini tidak harus mengarah pada kepuasan. Pelatihan, kewaspadaan, dan hal yang sudah BP lakukan hingga saat ini harus dilanjutkan dengan ketat sebagaimana CSTS terus menurunkan jumlah pekerja TEP

Tanggapan BP: *Setuju. Kami akan melanjutkan kolaborasi dengan tim sekuriti CSTS, tidak hanya untuk pelatihan, drill, dan juga ujicoba, namun juga koordinasi interface dan operasi sebagai upaya berkelanjutan dalam memastikan Tangguh site yang aman.*

8. **Rekomendasi TIAP:** BP harus bekerja Bersama dengan Bupati, SKK Migas, dan pejabat regional untuk mendorong kewajiban AMDAL yang setara kepada pengembang industri lain di Teluk Bintuni, untuk mengadopsi dan memenuhi pengaturan keamanan, kebutuhan tenaga kerja dan program sosial sebagaimana yang diimplementasikan oleh BP

Tanggapan BP: *Setuju dengan ketentuan bahwa BP akan terus mempengaruhi apa yang telah dilakukan sejauh ini.*

9. **Rekomendasi TIAP:** BP harus terus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur teknologi keamanan daring dan secara teratur meninjau praktik daring-nya. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberikan pelatihan keamanan dunia maya secara teratur.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan mengevaluasi secara komprehensif dan meningkatkan perilaku pekerja terhadap ancaman cyber, perencanaan bisnis yang berkelanjutan, serta proses pengendalian keamanan jaringan.*

B. Pengelolaan bagi hasil

Rekomendasi TIAP: Mengikuti arahan sesuai dengan Perdasus Papua Barat, BP harus menyediakan dukungan yang sesuai bagi Bupati dan legislatif Teluk Bintuni dalam upaya mereka menyusun draft and implementasi Perdasus yang akan dialokasikan dan mengatur distribusi dana bagi hasil Tangguh ke kabupaten.

Tanggapan BP: *Setuju. Dukungan dan bantuan teknis kami untuk pengembangan kebijakan local mengenai pendistribusian dana bagi hasil pada tingkat kabupaten akan berlanjut melibatkan SKKMIGAS dan mitra pelaksana.*

C. Pengembangan tenaga kerja Papua

1. **Rekomendasi TIAP:** Program pemagangan Papua merupakan keberhasilan. Saat ini direncanakan memiliki tiga angkatan yang berjumlah 40 orang akan mengisi 120 posisi teknisi tingkat pemula di Tangguh. Karena pentingnya program ini, BP harus secara tahunan mengevaluasi kebutuhannya untuk kebutuhan teknisi ke depannya dan, apabila akan ada peluang bagi teknisi tingkat pemula dalam tiga tahun, BP harus melanjutkan program tersebut dengan jumlah pelajar Papua yang sesuai yang bisa mengisi posisi tersebut.

Tanggapan BP: *Pada saat ini, jumlah teknisi yang ada di program pemagangan teknis Papua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan posisi teknisi untuk operasi Tangguh untuk menjalankan bisnis tiga train. Pada saat mereka direkrut oleh BP, kami akan terus memantau dan melakukan pengembangan kepada mereka melalui CMAS (Competency Management Assessment System) sehingga mereka dapat sepenuhnya berkompoten sebagai teknisi. Kami akan melakukan kajian dan mengevaluasi kembali kebutuhan bisnis serta perubahan kebijakan dalam jangka panjang.*

2. **Rekomendasi TIAP:** Apabila BP telah berhasil mencapai komitmennya pada tahun 2029, hal ini sama pentingnya dengan BP menyediakan peluang bagi tenaga kerja Papua untuk meningkatkan posisinya ke posisi manajer senior. Untuk menuju tujuan tersebut, manajemen senior harus bertemu dengan perwakilan dari pekerja Papua (Papuan Steering Committee) secara rutin ketika mengunjungi Tangguh; mereka harus mendorong para mentor untuk menyediakan bimbingan dan mendukung mentess Papua, dan, dimanapun, mendorong manajer non-Papua untuk mendukung dan mendorong tenaga kerja Papua yang berkualitas di tim mereka

Tanggapan BP: *Setuju. BP's leadership bertemu dengan komite perwakilan tenaga kerja Papua saat melakukan kunjungan ke Tangguh. Program pengembangan tenaga kerja Papua akan terus berlanjut sebagai agenda tersendiri dalam forum kapabilitas dari setiap divisi atau pertemuan karyawan. Forum tersebut untuk mendiskusikan dan memberikan hasil pemantauan, dukungan dan intervensi atas hasil kerja, pengembangan dan rencana kedepannya.*

3. **Rekomendasi TIAP:** Tangguh telah mengembangkan program Tangguh *Emerging Leadership Development* dan *program Challenger* yang menyediakan peluang bagi para pelajar Papua lulusan universitas yang berkualitas. Program-program ini membuat masyarakat Papua dapat naik ke jenjang manajemen senior. Untuk mencapai komitmen dimana Tangguh dijalankan oleh mayoritas tenaga kerja Papua di tahun 2029, BP harus memilih setidaknya dua Challenger Papua setiap tahunnya, termasuk perempuan diantaranya, untuk menjadikannya sebagai manajer yang terlatih.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus menemukan dan merekrut orang Papua yang memiliki bakat (termasuk melalui program challenger) sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasi.*

4. **Rekomendasi TIAP:** Untuk memenuhi komitmen tenaga kerja Papua terampil dan manajer di tahun 2029, BP harus meningkatkan penyerapan tenaga kerja Papua eksternal yang berkualitas, berpengalaman untuk memenuhi posisi senior. BP harus memperluas proses penerimaan tenaga kerja di Universitas Papua dan pasar

tenaga kerja lain di Papua. Para pekerja Papua juga harus mengetahui apabila ada peluang kerja, agar mereka dapat mendaftarkan diri dan memperluas jaringan bagi pendaftar lain yang berpotensi

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus menemukan dan merekrut orang Papua yang berbakat, baik yang baru lulus maupun berpengalaman, sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasi. Pengumuman mengenai lowongan kerja ditempatkan di universitas, kantor disnaker, jejaring sosial informal luar negeri, serta bursa pasar kerja di Papua, yang diatur oleh kebijakan proses rekrutmen kami, termasuk proses rekrutmen yang adil dan transparan.*

5. **Rekomendasi TIAP:** CSTS sudah memenuhi persyaratan EPC kontrak untuk memperkerjakan tenaga kerja Papua tidak terampil, semi-terampil, dan terampil. Namun gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mempekerjakan tenaga kerja Papua di posisi manajerial/ supervisor. Hal ini harus ditangani segera. BP harus bekerja dengan CSTS untuk mengimplementasikan penerimaan tenaga kerja tambahan dan menyediakan pelatihan yang sesuai, karena waktu yang semakin sedikit dalam memenuhi Tanggah jawab tersebut.

Tanggapan BP: *BP akan terus bekerjasama dengan CSTS untuk memaksimalkan upaya pada bagian ini dan memprioritaskan tenaga kerja Papua untuk sisa waktu dari proyek. Sejak November 2019, CSTS dan subkontraktornya meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk masyarakat asli/Bintuni/Fakfak pada tingkat pengawas/supervisor dari 29 menjadi 37 secara keseluruhan.*

Pandemi COVID 19 mengharuskan proyek untuk mengurangi dan membatasi jumlah tenaga kerja proyek di Tangguh site hingga mencapai 50% mulai dari Maret 2020 untuk memastikan agar pekerja aman dan Tangguh LNG bebas dari virus. Meskipun adanya pandemic dan semua pembatasan tersebut, proyek konstruksi Tangguh Train 3 terus berjalan dengan aman. Saat ini, proyek memasuki tahap berikutnya dari kegiatan konstruksi yang memerlukan tenaga kerja terampil yang berbeda seperti pemasangan pipa, instrumentasi/pemasangan instalasi listrik, pengujian dan lain sebagainya, yang umumnya tidak tersedia di Papua. Namun demikian, kami masih terus memerlukan tenaga kerja tidak langsung dan pendukung, dimana kami akan memprioritaskan posisi ini untuk tenaga kerja local Papua sesuai kebutuhan semestinya.

Program restorasi rumah dipesisir utara

1. **Rekomendasi TIAP:** Komitmen AMDAL untuk membangun rumah-rumah baru di tiga distrik pesisir utara tidak akan selesai ketika TEP selesai. Program ini penting tidak hanya bagi pembangunan kampung, tapi juga untuk mengatasi ketegangan diantara masyarakat di pesisir utara dan selatan yang telah ada selama 15 tahun. BP harus mengambil peran pengawasan yang lebih besar dalam proyek, menempatkan senior manajer yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya, dan mengamankan kayu dari mana pun yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus melanjutkan program perumahan mereka. Melanjutkan penyelesaian pembangunan 21 rumah pada 2019, BP saat ini bekerja bersama pemerintah daerah setempat untuk proses pengadaan (tender) proses restorasi perumahan dengan target 2020-2021. Tim proyek yang dibentuk di bulan Juni 2019 memantau performa dari kontraktor dan merespon jika ada aspirasi atau pertanyaan dari masyarakat. Kami juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat untuk pengadaan kayu dari wilayah lain di dalam provinsi Papua Barat.*

2. **Rekomendasi TIAP:** Lebih lanjut, apabila pembangunan rumah tidak diselesaikan tepat waktu, kompensasi perlu diberikan kepada kampung-kampung yang terkena dampak. Bentuknya dapat berupa apapun yang telah disetujui. Satu mekanisme, yang memberikan manfaat kepada semua kampung, adalah dengan memberikan kontribusi pendanaan terhadap perbaikan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemimpin kampung, mekanisme ini sama dengan *Community Action Plans* ("CAPs").

Tanggapan BP: Sebagai program yang dipimpin oleh Pemda Teluk Bintuni, BP sangat berhati-hati untuk menerapkan kompensasi terhadap kontraktor. Selain itu, sejalan dengan komitmen AMDAL, BP mempertimbangkan bahwa program *community action plan* / perencanaan bersama masyarakat atau program lainnya yang sama dengan program ini, tidak lagi dapat dilakukan, mengingat sudah ada banyak sumberdaya yang tersedia di kampung dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan kampung.

Pelistrikan

Rekomendasi TIAP: Listrik berbasis jaringan, yang merupakan komitmen AMDAL, belum diterima oleh masyarakat di kampung-kampung di pesisir utara dan selatan, termasuk Babo, yang mana terletak base camp dan bandara BP. BP telah memenuhi komitmennya untuk menyediakan pembangkit listrik, namun PLN belum membangun atau mengaktifkan jaringan listriknya. BP harus mendorong PLN untuk menyediakan infrastruktur ini. Namun hingga PLN berkomitmen untuk menetapkan waktu penyediaan jaringan listrik, BP harus meminta otoritas untuk menyediakan tenaga diesel di Babo selama 24/7, dan atau menyediakan tenaga diesel tambahan, atau menyediakan lampu solar atau pembangkit listrik tenaga solar lainnya bagi semua kampung yang belum dialiri listrik.

Tanggapan BP: Kami akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dan pemda setempat untuk melanjutkan dukungan kami mengenai program listrik bagi Babo selama proyek PLN belum dilaksanakan. Hal ini termasuk meminjamkan generator Tangguh dengan kapasitas sebesar 350KVA sesuai kebutuhan

Pendidikan

1. **Rekomendasi TIAP:** BP harus tetap melanjutkan dukungan ekektifnya bagi Pendidikan dasar di Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan bantuan guru, materi, dan computer bagi pelajar di kampung-kampung yang dicakup di dalam AMDAL.

Tanggapan BP: Mengacu kepada komitmen AMDAL, BP akan terus memberikan dukungan kepada pemda untuk memperbaiki program pendidikan dasar di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga memenuhi standar pendidikan nasional. Bersama-sama dengan mitra pelaksana, kami terus mengadvokasi perlunya memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan, yang difokuskan pada penguatan pengelolaan sekolah. Selain itu, sejalan dengan strategi local serta meningkatnya kapasitas pemda, saat ini BP memfokuskan pada upaya untuk memberikan aspek soft skill seperti pengembangan kapasitas dan dukungan teknis bagi guru dan kepala sekolah, termasuk mengembangkan lingkungan yang lebih kondusif terhadap program. Sementara itu, pemda bertanggung jawab penuh untuk aspek pengadaan infrastruktur dan fisik. Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah serta penguatan proses pembelajaran, BP hanya akan memberikan sedikit dukungan infrastruktur pada sekolah-sekolah terpilih.

2. **Rekomendasi TIAP:** Dalam AMDAL BP berkomitmen untuk menyediakan setidaknya satu sekolah rujukan di area tersebut, di mana pelajar terbaik dapat belajar dan menyiapkan diri untuk menerima Pendidikan yang lebih tinggi. Komitmen ini telah tertunda selama beberapa waktu, baru-baru ini terjadi karena cakupan yurisdiksi bagi sekolah menengah telah dipindahkan dari kabupaten ke propinsi. BP harus dapat memenuhi komitmennya tersebut, bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan sekolah rujukan baik di pesisir utara dan selatan Teluk Bintuni.

Tanggapan BP: Sebagai bagian dari implementasi AMDAL, BP dan pemda Teluk Bintuni telah setuju untuk mengembangkan program sekolah model yang dapat menyediakan akses pendidikan yang berkualitas di wilayah ini. Pemilihan sekolah mengacu kepada masukan dari pemda setempat dan hasil dari suatu kajian. Pada bulan November 2019, kesepakatan kerjasama untuk sekolah model di TMB telah ditandatangani antara BP dan pemda Teluk Bintuni. Pada bulan Februari 2020, pemda menunjuk SMP Santa Monika di Kota Bintuni sebagai sekolah model kedua. Kedua sekolah ini merupakan rujukan bagi siswa siswi masyarakat asli dari kampung sekitar. Pemda Teluk Bintuni menyediakan dukungan infrastruktur termasuk ruang kelas, fasilitas lab, dan pagar sekolah. Pada awal tahun ini, pemda mengambil alih pembayaran gaji guru di SMP TMB untuk guru penuh waktu yang direkrut oleh Tangguh. Tangguh akan terus mendukung pengembangan sekolah model sebagaimana ditulis dalam AMDAL melalui proses konsultasi bersama pemda setempat.

3. **Rekomendasi TIAP:** BP harus melanjutkan upayanya untuk menyediakan beasiswa melalui SKK Migas kepada pelajar Papua yang berprestasi untuk melanjutkan ke Pendidikan universitas.

Tanggapan BP: Setuju. BP akan terus menyediakan beasiswa khususnya untuk siswa-siswa masyarakat asli yang berbakat sebagai bagian dari komitmen AMDAL. Namun demikian, mengingat kapasitas dari pemda setempat sudah meningkat, BP juga akan memfasilitasi siswa siswi lokal yang berpotensi khususnya dari kelompok masyarakat asli untuk mengakses berbagai sumber beasiswa dari pemerintah sehingga diharapkan akan banyak siswa siswi yang dapat memiliki pendidikan lebih baik.

Kesehatan

Rekomendasi TIAP: Pelayanan kesehatan di daerah telah meningkat secara drastis sebagai hasil dari inisiatif BP dan dukungannya bagi program kesehatan di kabupaten. Namun pelayanan kesehatan masih secara signifikan berada di bawah standar nasional. Rumah sakit Bintuni merupakan kunci sukses kemajuan untuk hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. BP harus tetap melanjutkan untuk tetap bekerja sama dengan Bupati untuk memperbaiki fasilitas dan kapasitas rumah sakit untuk menjadi rumah sakit rujukan.

Tanggapan BP: Setuju. BP akan terus memberikan dukungannya bagi rumah sakit Bintuni yang difokuskan pada penyediaan dukungan teknis, mengingat kami sangat yakin pemda setempat telah memiliki kapabilitas untuk memenuhi aspek fisik yang diperlukan.

Pengembangan Ekonomi

1. **Rekomendasi TIAP:** Koperasi produksi dan ikan di Teluk Bintuni yang dikelola oleh BP secara umum telah berhasil. BP telah memenuhi kewajiban pembeliannya. Namun CSTS belum memenuhi semua komitmen pembeliannya, sebagian disebabkan oleh keterbatasan logistic dan waktu. BP harus bekerja dengan CSTS dan subkontraktornya untuk menyelesaikan semua isu yang akan menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila jumlah penyerapan produk tidak tercapai, BP harus mendorong pinalti kontrak dan menyediakan kompensasi bagi koperasi kampung.

Tanggapan BP: Berdasarkan pemantauan bulanan dan audit tahunan yang dilakukan BP, CSTS telah memenuhi kewajibannya untuk menyerap minimal 10% produk makanan yang dihasilkan dari masyarakat asli sesuai mandat AMDAL 2.

Sebagai klarifikasi, kontrak EPC dengan CSTS tidak menyebutkan secara khusus mengenai pemberian pinalti atau kompensasi kepada koperasi masyarakat apabila pembelian dari koperasi tidak memenuhi komitmen yang ditentukan.

2. **Rekomendasi TIAP:** Unit usaha SUBITU yang telah dibina oleh BP merupakan unit usaha yang menjanjikan, dan tetap membutuhkan dukungan BP, setidaknya hingga usaha tersebut mulai beroperasi di Teluk Bintuni dan

menyediakan pasar alternatif. BP harus mendukung terbentuknya unit usaha lokal tambahan, seperti *laundry* (jasa cuci), *scaffolding* dan pemeliharaan.

Tanggapan BP: *Setuju. Kami akan terus memberikan dukungan kami kepada SUBITU untuk memenuhi kebutuhan Tangguh maupun pasar di Bintuni. Pada awal 2020, SUBITU laundry telah dibuka di Kota Bintuni yang dikelola oleh pemuda pemudi masyarakat asli yang baru saja menyelesaikan kuliah mereka di Bandung Jawa Barat.*

3. **Rekomendasi TIAP:** Unit usaha taksi air yang didukung oleh BP merupakan elemen penting di dalam pembangunan ekonomi di Teluk Bintuni. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk memastikan keberlangsungan operasi, dan mencari perusahaan lain yang akan masuk ke daerah tersebut untuk mendukung atau mensubsidi usaha ini.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus mendorong pemangku kepentingan terkait di Bintuni untuk mendukung pengembangan taksi air dan mengoptimalkan kehadiran bisnis tersebut di Bintuni.*

Lingkungan, pemeliharaan dan tampilan

1. **Rekomendasi TIAP:** Pengawasan BP yang melekat dan berkoordinasi dengan CSTS terhadap perlindungan lingkungan harus tetap berlanjut hingga TEP selesai. Hasil yang baik hingga saat ini tidak bisa menjamin akan ada hingga proyek selesai.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus melakukan pengelolaan lingkungan dan memantau secara melekat serta berkoordinasi dengan CSTS secara komprehensif sampai proyek selesai untuk memastikan perlindungan lingkungan dikelola sesuai dengan ketentuan AMDAL dan lenders.*

2. **Rekomendasi TIAP:** BP harus terus melanjutkan untuk mengambil tindakan apapun yang perlu dilakukan untuk mengurangi pembakaran gas, khususnya pada hari yang panas ketika pembakaran membentuk awan hitam.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan terus mengidentifikasi dan melakukan upaya perbaikan dari flaring (pembakaran gas). Flaring (pembakaran gas) itu sendiri berkontribusi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Sejak 2010, kami telah melihat adanya pengurangan sebesar 85% dari flaring.*

3. **Rekomendasi TIAP:** Ketika telah selesai, BP harus melihat kembali hasil dari survei perikanan rutin di Bintuni dan mengambil langkah untuk mengatasi degradasi yang ditemukan dalam survei tersebut. BP juga harus terus melakukan survei perikanan dua tahunan hingga tahun 2035.

Tanggapan BP: *Setuju. BP akan mengambil beberapa tindakan yang diperlukan untuk menanggapi rekomendasi yang sesuai dari kegiatan survey perikanan di kawasan Teluk Bintuni pada 2019 dan akan terus melakukan survey secara periodik selama tiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan AMDAL.*

4. **Rekomendasi TIAP:** BP harus menugaskan manajer senior untuk mengawasi kinerja pemeliharaan fasilitas kontraktornya, dan membutuhkan perbaikan atau pembersihan segera terhadap tanda-tanda kerusakan yang terlihat.

Tanggapan BP: *Menindaklanjuti kunjungan TIAP pada bulan Januari, BP dan kontraktornya bersama-sama melaksanakan survey ke camp konstruksi sementara, dan hasilnya telah digunakan oleh kontraktor untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan. Seorang manajer HSE senior untuk aspek industrial and occupational hygiene telah ditempatkan untuk memantau pemeliharaan camp kontraktor dan melakukan perbaikan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar HSE serta mengkonfirmasi bahwa camp tersebut sesuai dengan peruntukkannya sampai akhir proyek.*

Koordinasi dan kerjasama dengan pengembang lokal

1. **Rekomendasi TIAP:** BP, dengan bekerja sama dengan Bupati dan Gubernur, harus saling bertukar praktek terbaiknya dengan perusahaan besar lain yang masuk ke Teluk Bintuni, termasuk Genting Oil dan perusahaan Petrochemical, untuk mendorong mereka mengadaptasi kebijakan yang mendukung kebutuhan lokal, khususnya: a) mempekerjakan tenaga kerja Papua yang dilepaskan oleh BP atau CSTS pada saat pembangunan TEP selesai, khususnya petugas keamanan; b) membeli produk, ikan, dan produk makanan lainnya dari koperasi lokal; c) mengadopsi kebijakan ICBS dan menyediakan pelatihan HAM bagi semua petugas keamanan,

2. **Rekomendasi TIAP:** Bekerja sama dengan Bupati, BP harus menyediakan dukungan di luar yang aktif untuk mendorong perusahaan baru di Teluk untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal yang sudah tidak bekerja di operasi BP dan konstruksi TEP.

Tanggapan BP 1&2: BP akan terus melakukan koordinasi dengan SKKMIGAS dan Bupati Teluk Bintuni untuk mempengaruhi investor lain yang mengoperasikan bisnisnya di Bintuni, agar menggunakan kebijakan yang sama sebagai bagian dari pengelolaan sosial dan risiko, termasuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat asli untuk aspek ketenagakerjaan serta program rantai pasokan, dan mengadopsi prinsip-prinsip ICBS.

Gas to power

Rekomendasi TIAP: Tangguh LNG menyediakan daya pada jaringan listrik ke Papua telah lama menjadi tujuan dan komitmen pada saat ini. BP membangun semua fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk mengakomodasi tanker mini di dermaganya. Namun penundaan birokrasi dan kelambanan dari PLN telah menahan implementasi melebihi penyelesaian TEP. BP masih bisa memainkan peran pembangunannya, dan harus menggandeng Gubernur, PLN dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk mempercepat aktifasi program, khususnya Papua Barat.

Tanggapan BP: Setuju. BP akan terus mendorong pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan dari program gas to power termasuk mendukung proses due diligence dan penyelesaian penandatanganan kerjasama antara PLN dan PGNE (sebuah perusahaan patungan antara PGN LNG dengan Perusda Pemda Papua Barat, sebagai pemasok untuk PLN), serta memastikan adanya harmonisasi dengan Rencana Umum Pemasok Tenaga listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Listrik Nasional (RUKN) alokasi LNG untuk listrik di wilayah Papua dan Maluku

Lampiran A. Status rekomendasi TIAP

REKOMENDASI TIAP DARI KUNJUNGAN SEPTEMBER 2017

A. Tata kelola dan advokasi

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
1. Melanjutkan dukungan tata kelola bagi pemerintah daerah; dukungan tersebut tidak boleh ditunda dan harus ditingkatkan. Dukungan harus dibahas dengan Gubernur demi membantu gubernur dan DPRD melaksanakan program-program yang terkait dengan komitmen Tangguh.	Setuju. Kami telah mengembangkan sebuah kontrak dan memberikannya kepada organisasi non-pemerintah nasional, Kemitraan, sebagai mitra pelaksana kami untuk program pemerintahan. Kami akan terus bekerja sama dengan Bupati dan Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program yang memiliki tujuan dan aktif.	Berlanjut. Konsultasi dengan pemda setempat untuk implementasi program masih berlanjut. Sampai November 2019, beberapa dukungan teknis telah diberikan kepada pemda setempat untuk beberapa area seperti perencanaan strategis, anggaran, dan penyadaran mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pertemuan koordinasi untuk mensinkronkan program pemerintah daerah terutama sector-sektor terkait, secara rutin dilaksanakan.
2. Upaya hubungan pemerintah yang lebih aktif di Pemerintah Indonesia yang lebih tinggi harus dilakukan. Komunikasi harus ditingkatkan antara manajemen senior BP Indonesia dan kantor Presiden dan Wakil Presiden, serta menteri koordinator dengan yurisdiksi atas Tangguh. Kantor pejabat tinggi ini harus terus diinformasikan tentang pentingnya menyelesaikan penundaan dan perselisihan lokal, dan meminta untuk melakukan intervensi jika memungkinkan.	Setuju. Kami akan terus memperbarui informasi kepada pemangku kepentingan utama di tingkat nasional mengenai pengembangan Kilang 3 Tangguh dan komitmen BP untuk para pemangku kepentingan nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan tenaga kerja dan pelayanan.	Berlanjut. Pertemuan dengan pemangku kepentingan kunci ditingkat nasional masih berlanjut untuk memberikan gambaran kepada mereka mengenai perkembangan proyek, serta meminta dukungan mereka terkait dengan isu proyek.
3. Upaya harus diperbaharui dalam menjadwalkan ulang kunjungan Presiden ke Tangguh yang sempat dibatalkan. Sebelum berkunjung, BP harus berusaha untuk mencari isu-isu penting yang berkaitan dengan Tangguh masuk ke dalam agenda Presiden pada kunjungan ke Papua Barat mendatang. Selanjutnya, BP harus mendorong dan memfasilitasi pertemuan rutin	Keterlibatan dengan kantor Presiden merupakan bagian dari upaya manajemen hubungan kami untuk memastikan bahwa pejabat tinggi pemerintah telah sepenuhnya diperbaharui dalam proyek ini. Kami akan menilai	BP masih terus melakukan engagement kepada pemangku kepentingan tertinggi di pemerintah untuk memberikan gambaran terakhir mengenai proyek. Selama 2018 sampai awal 2019, pemerintah masih fokus memprioritaskan pemilu presiden dan anggota dewan. Engagement juga dilakukan melalui SKKMIGAS terutama terkait dengan proyek Tangguh train 3.

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
dengan pejabat penting dari Pemerintah Indonesia dengan Gubernur dan Bupati untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi TEP.	kemungkinan kunjungan orang penting (VIP) jika sedang dalam pelayanan pengiriman proyek.	
4. Grup CEO, pada kunjungan berikutnya ke Indonesia, harus menyampaikan undangan kepada Presiden untuk bergabung dalam kunjungannya ke Tangguh. Untuk memberikan insentif lebih lanjut bagi Presiden agar mengunjungi Teluk Bintuni dan Tangguh, BP harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan pemimpin lokal untuk mengatasi kendala sehingga Presiden dapat mengumumkan tonggak sejarah dalam program sosial yang berkaitan dengan Tangguh, seperti perumahan Pantai Utara atau listrik. Hal ini akan memungkinkan Presiden untuk menyoroti hubungan antara Tangguh dan program sosial baru untuk masyarakat asli Papua.	Kepala eksekutif BP Bob Dudley menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi Tangguh dengan surat resmi sebelum FID pada tahun 2016. Mengenai pengelolaan masalah sosial yang dihadapi Tangguh, seperti perumahan Pantai Utara dan listrik, kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PLN sehingga kedua kegiatan tersebut bisa diimplementasi tanpa penundaan lebih lanjut.	Kami masih terus melakukan engagement kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan dukungan dalam pencapaian milestone dari program sosial Tangguh, khususnya terkait dengan restorasi perumahan di wilayah utara. Kami bekerja secara erat dengan SKKMIGAS dan pemda Teluk Bintuni untuk menjawab masalah-masalah terkait NSH. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan SKKMIGAS, ESDM, PLN dan pemda Papua Barat untuk melanjutkan program listrik termasuk <i>gas to power</i> .

B. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status as of November 2019
1. Upaya yang lebih besar harus dilakukan dan dipertahankan untuk merekrut, melatih dan mempromosikan masyarakat Papua jika komitmen AMDAL tentang tenaga kerja Papua pada tahun 2029 harus dipenuhi.	Setuju. Saat ini kami memiliki Program Magang Teknisi, yang dimulai pada tahun 2016, dimana kami mempekerjakan pekerja magang dan melatih mereka melalui program pelatihan tiga tahun. Setelah itu, peserta magang yang sukses akan dipekerjakan sebagai teknisi operasi atau pemeliharaan untuk mendukung ketiga kilang tersebut. Selain itu, kami juga akan meninjau kontrak yang ada dan yang baru untuk memastikan bahwa kami terus meningkatkan target kami untuk masyarakat Papua yang bekerja di semua tingkat keahlian. Kami juga akan meninjau mengenai konsekuensi ketidaksesuaian secara hukum. Pemantauan akan dibahas secara rutin dalam rapat presiden regional, yang dihadiri oleh semua	Kami telah merekrut tiga angkatan Program Pemagangan Teknisi Papua. Kami juga telah meluluskan dan merekrut Angkatan pertama di tahun 2019. Dari 40 orang yang mulai ikut dari awal program, akhirnya kami merekrut sebanyak 32 orang untuk bergabung di BP. Proses pemantauan program secara rutin masih berlanjut.

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status as of November 2019
	<p>wakil presiden. Sebagai tambahan, kami telah mengenalkan program Tangguh Emerging Leaders untuk mengarahkan masyarakat Papua yang memiliki potensi melalui proses tinjauan bakat. Wakil presiden (VP) sumber daya manusia untuk Asia Pasifik adalah koordinator dan bekerja sama dengan VP Operasi, Asia Pasifik, dan presiden regional kami untuk memajukan upaya ini. BP memprakarsai beberapa program dengan universitas lokal di Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan industri minyak dan gas kepada siswa dan, khususnya menyoroti peluang pengembangan.</p>	
<p>2. Program magang untuk masyarakat Papua menunjukkan harapan besar untuk melatih pekerja terampil. BP harus tetap berkomitmen selama posisi untuk lulusan tersebut tetap tersedia. Berdasarkan tingkat atrisi yang tidak dapat dihindari, BP juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah rekrutmen yang masuk kelas awal.</p>	<p>Program magang diciptakan untuk mempercepat usaha kami dalam memenuhi komitmen pekerja Papua sebesar 85% pada tahun 2029, terutama untuk pekerja terampil, untuk operasi Tangguh. Jumlah rekrutmen dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi Tangguh.</p>	<p>Kami telah setuju bahwa ketiga Angkatan dari program pemagangan teknisi untuk anak Papua akan sesuai dengan kebutuhan operasi di masa depan.</p>
<p>3. BP harus meningkatkan kualifikasi perekrutan masyarakat Papua yang berpengalaman untuk mengisi posisi yang lebih senior. Paling tidak, BP harus meningkatkan pemberitahuan publik tentang lowongan pekerjaan di universitas Papua dan pasar kerja lainnya di Papua melalui iklan atau rekrutmen langsung di lokasi. BP harus memberi tahu semua kesempatan kerja kepada karyawan Papua, agar mereka mendaftar sebagai perekrut dan meningkatkan jaringan calon pelamar. Selanjutnya, BP harus menyewa konsultan ketenagakerjaan, dengan pengalaman di bidang tersebut, untuk mencari masyarakat Papua yang berbakat dan berkualitas.</p>	<p>Setuju. Kami akan terus mencari dan merekrut masyarakat Papua yang berbakat sesuai kebutuhan operasi kami dan untuk mengakomodasi rencana suksesi yang tepat di dalam organisasi.</p>	<p>Kegiatan Ini berlanjut melalui <i>challenge program</i> dan secara aktif didiskusikan dan dipantau dalam <i>capability forum</i>.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status as of November 2019
4. Manajemen senior BP harus terus bertemu dan bertukar pandangan dengan Komite Tenaga Kerja Papua secara teratur. Kelompok ini menyediakan mekanisme komunikasi yang bermanfaat dan terorganisir bagi tenaga kerja Papua untuk menyampaikan permasalahan dan keprihatinan atau menyarankan gagasan mengenai pengembangan karir dan peluang bagi tenaga kerja Papua.	Setuju. Manajemen senior bertemu dengan komite secara teratur selama kunjungannya ke Tangguh.	Kegiatan ini masih berlanjut secara rutin di Tangguh site dengan VP operasi kami atau dengan <i>BP leadership</i> lainnya.
5. Manajemen senior juga harus terus mendorong semua manajer di Tangguh untuk membimbing tenaga kerja Papua yang meminta bimbingan.	Setuju. Manajemen senior akan melanjutkan upaya mereka dalam membimbing tenaga kerja Papua.	Program ini masih berlanjut, kami sangat yakin bahwa setiap pekerja Papua telah memiliki seorang mentor.
6. Tenaga kerja Papua yang berkualitas harus diberi tahu tentang pembukaan apa pun yang muncul di Jakarta dan diberi kesempatan yang sama untuk mengisi posisi tersebut.	Setuju. Pengumuman lowongan pekerjaan dapat diakses oleh publik maupun seluruh karyawan. Dalam kasus tertentu, pemimpin tim juga dapat mendekati individu yang mereka rasa sesuai dengan persyaratan.	Program masih berlanjut termasuk melalui system rekrutmen dan penelusuran bakat kami, dimana lowongan di umumkan, dan dapat dilihat oleh publik. Setiap orang dapat mengajukan lamaran jika tertarik. Ini untuk menjamin proses yang transparan dan adil.
7. Untuk setiap layanan atau produk Tangguh yang dikontrak, BP harus memasukkan hak untuk memberlakukan sanksi keuangan kepada kontraktor ke dalam kontrak tersebut jika tidak memenuhi persyaratan perekrutan masyarakat Papua yang telah disepakati sebelumnya, dan harus menerapkan persyaratan ini.	Setuju. Sanksi finansial telah diterapkan untuk semua kontrak baru sejak tahun 2016.	BP melakukan pemantauan secara melekat mengenai implementasi rekrutmen tenaga kerja Papua dan memberikan feedback kepada kontraktor jika ada penyimpangan, termasuk meminta mereka untuk melakukan perbaikan sampai memberikan sanksi dalam bentuk finansial.
8. Bagi TEP, BP telah memberlakukan kewajiban kontrak pada kontraktor CSTS untuk memenuhi tujuan perekrutan Papua. Persyaratan ini harus dipantau oleh BP dan diberlakukan secara ketat, mengingat pentingnya persyaratan tersebut dan jangka waktu yang singkat. Jika langkah perekrutan atau pelatihan tambahan diperlukan, BP harus berusaha keras agar segera dilembagakan, karena lead time sangat penting	Setuju. Kami sudah melakukan tindakan atas rekomendasi ini dengan komite lokal konten BP, yang secara teratur memantau semua kewajiban kontrak dan kemajuan melawan KPI. Sanksi akan dikenakan jika kontraktor tidak memenuhi persyaratannya.	BP terus melakukan pemantauan terhadap kontraktor utama T3 atas kewajibannya terkait dengan ketenagakerjaan dari Papua. Setiap dua minggu sekali update mengenai gambaran tenaga kerja di proyek TEP diterbitkan untuk memantau situasi tenaga kerja dan pencapaian komitmen. Dibandingkan dengan kewajiban dalam EPC kontrak, pencapaian tenaga kerja Papua masih on track.

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status as of November 2019
dalam memenuhi persyaratan dan kepatuhan ini akan jauh lebih baik daripada denda.		

C. Lingkungan dan pemeliharaan

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>1. Kinerja lingkungan BP untuk operasi Tangguh sangat baik. Untuk memastikan kepatuhan lingkungan TEP, BP harus menjaga pengawasan dan kewaspadaan yang ketat serta koordinasi dengan kontraktor. Ini harus mencakup pertemuan mingguan untuk menangani semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan dengan dampak lingkungan yang potensial, serta mekanisme untuk menanggapi setiap masalah yang timbul dengan cepat.</p>	<p>Tim lingkungan TEP BP di lokasi tersebut bekerja sama dengan kontraktor untuk mengawasi operasi mereka. Tim ini dipimpin oleh manajer HSE TEP dan mereka memastikan bahwa semua persyaratan lingkungan diterapkan sesuai dengan kontrak EPC dan persyaratan AMDAL. Jaminan kinerja lingkungan melibatkan pertemuan mingguan, inspeksi dan pemantauan berkala. Selain itu, tim melakukan investigasi dan menanggapi semua insiden lingkungan. Tim juga berkoordinasi dengan tim operasi lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan lingkungan.</p>	<p>BP terus melakukan pengawasan dan bekerja secara erat dengan kontraktor EPC. Setiap performa dari item lingkungan dimasukkan dalam system tracking dan dipantau oleh kontraktor EPC. Sistem tracking di update dalam mingguan dan didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam proyek dan juga manajer kepatuhan terhadap kebijakan dan lingkungan. Sesuai dengan laporan 6 bulanan AMDAL, status komitmen terhadap lingkungan di TEP masih dalam kategori taat, dan audit dari lenders di bulan Juli 2019 dilaporkan tidak ada temuan signifikan atau tidak taat/patuh.</p>
<p>2. BP harus terus menyadari pentingnya tampil sebagai pengingat harian atas kebanggaan dan standar setiap karyawan. Seharusnya tidak mentolerir fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya, atau lokasi konstruksi TEP pada umumnya, yang mencerminkan pemeliharaan yang berkurang atau buruk.</p>	<p>Keselamatan dan pemeliharaan adalah prioritas utama kami dalam memastikan operasi yang aman dan andal. Pemeliharaan semua fasilitas memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan kebersihan, dengan inspeksi pembersihan reguler sesuai dengan praktik industri umum. Kami memahami bahwa pada tahap konstruksi kebersihan beberapa fasilitas akan terpengaruh karena kegiatan proyek. Namun, mereka tetap memenuhi standar lingkungan.</p>	<p>BP mengawasi seluruh implementasi kebijakan HSE. Inspeksi regular dan swa-verifikasi dilakukan dan dipantau dengan baik. Swa verifikasi oleh kontraktor EPC dan pengawasan oleh BP akan menjamin performa dari aspek lingkungan terus terjaga. Jika ada penyimpangan atau tindakan yang perlu ditindaklanjuti akan didiskusikan dan di monitor/dilacak.</p> <p>Pertemuan rutin (tool box) dan sesi-sesi penyuluhan dilakukan untuk memastikan pesan mengenai lingkungan dapat disampaikan kepada seluruh pekerja terutama di organisasi lini depan.</p>

D. Keamanan

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>1. Mengingat potensi konsekuensi dari serangan cyber yang sukses dan evolusi hacking global yang terus berlanjut, BP harus terus memberlakukan dan menerapkan prosedur yang ketat dan canggih, dan harus memeriksanya secara teratur. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberi pelatihan keamanan online secara reguler.</p>	<p>Kebijakan keamanan cyber BP untuk pemimpin kelompok mencakup dua persyaratan utama yaitu (1) pemimpin kelompok harus mendorong perilaku keamanan cyber yang sesuai dalam bisnis mereka. (2) Mereka harus mengelola risiko cyber seperti risiko lainnya terhadap bisnis mereka.</p> <p>BP memiliki perilaku dan program kesadaran yang mapan, termasuk materi pelatihan. Ekspektasi perilaku dasar ditetapkan dalam kebijakan Protecting Our Information (POI). Kebijakan tersebut mendefinisikan enam perilaku penting. Kampanye kesadaran dilakukan secara teratur melalui jaringan duta cyber lokal dan diukur melalui Barometer Cyber, sebuah dasbor KPI. BP mengadakan Pekan Cyber tahunan agar fokus pada ancaman-ancaman cyber.</p>	<p>BP Terus meningkatkan kapabilitasnya mengenai keamanan cyber, dimana salahsatu nya adalah melalui penunjukkan duta keamanan cyber yang akan memimpin kampanye dan upaya-upaya untuk pengamanan cyber yang bersifat berkelanjutan.</p> <p>Kampanye mengenai kesadaran tentang keamanan cyber, termasuk kegiatan Cyber week yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan secara rutin di kantor BP Jakarta dan Tangguh LNG untuk mendorong perilaku aman, seperti <i>think before click; if you suspect it, you report it; clear desk and screen policy; protect your password; and, classify your information dan keep it secure.</i></p>
<p>2. Sistem operasi dan produksi Tangguh harus benar-benar terputus dari internet, dan akses harus dibatasi pada personil Tangguh yang berwenang dan memiliki banyak lapisan keamanan. TIAP juga sangat mendukung audit dua tahunan BP Group mengenai keamanan cyber.</p>	<p>BP membedakan sistem operasi dan produksi sebagai Process Control Network (PCN), yang benar-benar terputus dari internet dan dipisahkan dari jaringan BP (BP1) oleh Process Information Network (PIN). Kontrol keamanan informasi untuk sistem otomasi didokumentasikan dalam Praktik BP, Sistem Otomasi keamanan Cyber 3.5-0001 dan Praktik Kelompok 30-60, Sistem Otomasi Keamanan & Integritas Digital.</p> <p>Audit dua tahunan grup BP tentang keamanan cyber didasari oleh Praktik BP dan Grup di atas.</p>	<p>Untuk mencegah serangan cyber terhadap system operasi yang mengoperasikan Tangguh, sebuah system untuk memutus operasi BP dan produksi sebagai PCN dari internet yang dipisah dari BP1 melalui system PIN terus diberlakukan.</p> <p>Audit keamanan cyber BP dilakukan setiap tahun menggunakan kuesioner yang dilakukan secara system. Selain itu, barometer mengenai keamanan cyber juga digunakan untuk mengukur tingkat risiko terhadap keamanan cyber dan perilaku terkait dengan kesadaran keamanan cyber.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>3. Sangat penting bahwa Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS dilaksanakan secara sepenuhnya dan benar, terutama karena ini diberlakukan di antara semua subkontraktor. BP harus menggunakan proses koordinasi dan verifikasi dari rencana keamanan untuk mengawasi semua elemen keamanan TEP dan menuntut agar setiap aspek rencana keamanan dapat berjalan efektif. Sebagai tambahan, ketika mobilisasi para pekerja meningkat, BP harus bersikeras bahwa setiap kekurangan yang dirasakan dapat dikoreksi.</p>	<p>Setuju. Mekanisme untuk mengelola Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS telah diterapkan di tingkat Tangguh dan tingkat kepemimpinan di Jakarta, yang memungkinkan masalah-masalah kinerja dapat segera diidentifikasi, dibahas dan rencana perbaikan dapat disetujui.</p>	<p>Koordinasi dan verifikasi untuk menjamin rencana pengelolaan keamanan CSTS teru diimplementasikan. Salahsatu bentuk koordinasi adalah pertemuan penilaian kontrak bulanan untuk memvalidasi pelaksanaan program sekuriti di lapangan terkait dengan rencana dan target. Selain itu, pengecekan harian juga dilakukan untuk memantau kemungkinan deviasi pelaksanaan di lapangan. Jika deviasi yang terjadi minimal, perbaikan langsung akan segera dibuat. Namun, jika bersifat sangat kritis, akan dilakukan evaluasi dalam pertemuan mingguan dan bulanan.</p>
<p>4. Pelatihan lanjutan untuk para penjaga terkait Behavior Profiling and Surveillance Detection & Counter Measures harus dibuat permanen. Para penjaga yang terlatih dalam keterampilan ini harus ditugaskan secara teratur untuk bertugas di desa-desa terdekat. Pelatihan ini harus diberikan kepada penjaga selama jam kerja mereka, dan dipandang sebagai bagian dari tugas mereka yang dibutuhkan, reguler dan penting. Penjaga tambahan harus dipekerjakan jika diperlukan untuk mengakomodasi persyaratan pelatihan ini.</p>	<p>Setuju. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi petugas keamanan Tangguh merupakan prioritas abadi. Mereka telah dilatih dengan keterampilan keamanan tingkat tinggi di luar apa yang dijamin oleh peraturan pemerintah yang berlaku, dan rencana untuk pelatihan taktis tambahan telah disediakan. Penilaian terus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pelatihan dilaksanakan dengan cara yang paling efisien dan efektif.</p>	<p>Beberapa pelatihan untuk personil kemananan Tangguh dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, pelatihan yang bersifat wajib difasilitasi leh kepolisian, beberapa pelatihan yang diberikan termasuk, perilaku dan profil manusia, kekerasan ditempat kerja, penggunaan kekuatan yang berkesinambungan, VPHSR, serta surveilan untuk deteksi. Seluruh personil keamanan BP telah hadir dalam pelatihan wajib tersebut dari kepolisian sesuai dengan posisi mereka. Dampak dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus cukup signifikan. Personil keamanan merasa meningkat rasa percaya dirinya dalam melakukan tanggung jawab mereka karena mereka telah memahami berbagai pelatihan yang bermanfaat tersebut. Sebagai contoh, dalam penggunaan kekuatan yang berkesinambungan, mereka memahami tindakan proporsional yang perlu diambil dan konsekuensi nya jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur.</p>
<p>5. BP harus meninjau ulang pelatihan yang diberikan sejauh ini untuk para penjaga TEP, dan menentukan apakah pelatihan tersebut memberikan tingkat pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan di bawah ICBS dan JUKLAP. Jika tidak, modifikasi pelatihan harus dilakukan.</p>	<p>Setuju. BP bekerja sama dengan kontraktor utama TEP untuk memastikan bahwa petugas keamanan yang terakhir dilatih dengan standar yang sama dengan standar BP. Ada upaya yang disengaja untuk memastikan bahwa budaya 'satu tim' Tangguh, dalam konteks kemitraan keamanan antara kedua organisasi tersebut, diterjemahkan ke dalam rencana yang dapat</p>	<p>Training and drill-based capacity improvement have been endeavored progressively by TEP security. In fact, joint training between BP and TEP security teams have been routinely carried out including public order security management, VPSHR, use of force and others. Pelatihan dan peningkatan kapasitas berbasis-ujicoba telah diupayakan secara progresif oleh tim keamanan TEP. Bahkan, pelatihan bersama antara tim keamanan BP dan TEP telah dilakukan secara rutin termasuk manajemen keamanan ketertiban umum, VPSHR, penggunaan kekuatan dan lainnya.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
	ditindaklanjuti yang mencakup transfer pengetahuan, pembinaan, dan pelatihan bersama, pelatihan dan latihan.	Selain itu, pelatihan bersama di 2018 dan 2019 dilaksanakan bersama, bermitra dengan Polda Papua Barat, Polres Bintuni, Polsek Babo dan Polsek Aranday dengan menggunakan scenario ancaman terhadap TEP.
<p>6. BP harus yakin bahwa upaya CSTS cukup memadai dalam mendeteksi kemungkinan ancaman keamanan dari karyawan CSTS dan semua subkontraktornya. BP harus meninjau semua proses pemeriksaan untuk meminimalkan kemungkinan individu yang memiliki potensi ancaman dipekerjakan. Kode Etik BP harus diberlakukan secara ketat dan BP harus segera diberitahu tentang adanya pelanggaran atau perilaku lain oleh karyawan yang dapat menimbulkan ancaman. Karyawan harus diberi tahu bahwa kamar dan barang pribadi mereka akan dikenakan inspeksi mendadak oleh petugas keamanan untuk mencegah penyelundupan atau bahan-bahan radikal. Setiap hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran perilaku harus dilakukan secara bersamaan oleh CSTS dan BP.</p>	<p>Setuju. Mekanisme untuk kinerja manajemen Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS telah dilakukan di tingkat Tangguh dan tingkat kepemimpinan di Jakarta yang memungkinkan permasalahan kinerja segera diidentifikasi, dibahas dan rencana perbaikan disetujui. Lebih khusus lagi, fokus perhatian diberikan kepada proses pemeriksaan latar belakang, inspeksi personil, dan insiden / pelanggaran keamanan ditindaklanjuti secara menyeluruh, sambil memastikan penerapan kebijakan tindakan disipliner di seluruh wilayah.</p>	<p>Prosedur pemeriksaan CSTS telah ditingkatkan sesuai dengan rencana manajemen keamanan CSTS. Setiap kontraktor yang akan merekrut calon pekerja akan meminta pekerja memberikan sertifikat (SKCK) dari polisi setempat bahwa mereka tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian.</p> <p>Selain itu, pemeriksaan yang lebih komprehensif juga dilakukan oleh CSTS melalui koordinasi dengan BP untuk kemudian berkoordinasi dengan Polres Bintuni dan QRF. Jika ada temuan terkait dengan proses pemeriksaan, akan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan polisi, kepala kampung tempat calon pekerja berasal.</p>
<p>7. Meningkatkan sesi pertemuan intelijen sangat penting untuk mendeteksi dan peringatan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Keamanan Tangguh harus terus mendorong masyarakat setempat untuk berbagi informasi dengan BP tentang pendatang baru dan kegiatan yang tidak biasa atau tertutup, termasuk kesadaran akan kegiatan di rumah ibadah, untuk mendeteksi perilaku mengancam atau menghasut yang berkaitan dengan Tangguh.</p>	<p>Setuju. BP terus memanfaatkan hubungan positif dan konstruktif dengan pihak berwenang di tingkat lokal, regional dan nasional mengenai pertemuan dan pembagian intelijen. ICBS tetap menjadi sarana utama dimana BP bekerja sama dengan masyarakat dan tenaga kerja untuk mendeteksi, melaporkan dan menanggapi potensi gangguan dan / atau ancaman keamanan di daerah dan sekitar Tangguh.</p>	<p>In late December 2018, BP conducted law socialization in Babo to raise awareness that enhanced population data collection system as one of the mitigations of early prevention of the threat of radicalism and terrorism.</p> <p>Pada akhir Desember 2018, BP melakukan sosialisasi hukum di Babo untuk meningkatkan kesadaran mengenai sistem pengumpulan data penduduk sebagai salah satu mitigasi pencegahan dini terhadap ancaman radikalisme dan terorisme.</p> <p>Selain itu, pada tahun 2019, kami telah memfasilitasi FKPM untuk antara lain, mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah, mendiskusikan masalah keamanan dan sosial di masyarakat; memantau aktivitas para penduduk; dan, mengakomodasi dan mencari solusi untuk keluhan dari warga. Ini dilakukan untuk mendukung tujuan mendeteksi dan</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
		melakukan peringatan dini dari segala kegiatan yang mencurigakan.
<p>8. Perimeter keamanan harus ditingkatkan. Langkah yang lebih efektif dapat dimanfaatkan agar lebih aman dan memantau garis perbatasan. BP harus mempertimbangkan pagar yang lebih baik, serta meningkatkan penggunaan CCTV, <i>drone</i> dan patroli dilakukan setiap hari.</p>	<p>Setuju. Upaya akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan perimeter itu kuat dengan maksud untuk melakukan perbaikan dalam kaitannya dengan personal, proses keamanan dan penggunaan teknologi. Rencana peningkatan keamanan telah hadir dan proyek berhasil membawa perbaikan pada pelatihan keamanan staf, proses yang mereka ikuti serta teknologi untuk membantu mereka. Tangguh telah memulai operasi keamanan drone yang menyediakan pemantauan rutin pada aset dan operasi penting.</p>	<p>Pengawasan di pagar perimeter dilakukan dengan tiga metode, yaitu (1) mengerahkan personel di pagar luar (2) patroli drone, (3) patroli mobil, (4) pengawasan oleh CCTV.</p> <p>Semua penyimpangan dalam pelaksanaan patroli harus dilakukan dengan izin dari pimpinan BP. Patroli inspeksi rutin juga dilakukan untuk menentukan kondisi pagar saat ini, CCTV dan FIDS.</p> <p>Setiap temuan segera ditindaklanjuti dengan departemen terkait untuk perbaikan.</p>
<p>9. Keamanan laut harus ditingkatkan lebih lanjut. Selama konstruksi, keamanan CSTS memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan menjamin keselamatan semua wilayah konstruksi di pesisir dan kelautan. Namun karena akan ada begitu banyak lalu lintas di sekitar lokasi LNG selama konstruksi, penting bagi BP untuk dapat mengidentifikasi semua kapal di dekat dermaga atau berbagai platform lain sebelum mereka tiba. Berkoordinasi dengan CSTS, memanfaatkan radio atau komunikasi lainnya, serta CCTV, radar, lidar, atau teknologi lain yang tersedia, BP harus memfasilitasi peringatan dini tentang aktivitas laut yang memiliki intensitas buruk. Selain itu, komunikasi reguler dengan pangkalan Angkatan Laut di Sorong harus dilembagakan, melalui jalur yang tepat, terutama untuk mengkoordinasikan tanggap darurat. Selanjutnya, BP harus menjajaki kemungkinan potensi peningkatan kapasitas unit patroli genggam bersama (joint mobile patrol/"JMP") dengan polisi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan penangkapan ikan tradisional.</p>	<p>Setuju. BP telah bekerja sama dengan CSTS untuk memperkuat keamanan laut. Kemampuan keamanan patroli laut telah meningkat secara signifikan melalui penyebaran kapal patroli CSTS yang bekerja sama dengan BP di sepanjang garis pantai Tangguh. Selain itu, BP, dengan bantuan otoritas lokal, telah meningkatkan upaya sosialisasi undang-undang zona pengecualian laut ke masyarakat sekitar. BP memiliki hubungan positif dan konstruktif dengan pangkalan angkatan laut di Sorong, serta pos angkatan laut di Bintuni, dan bertujuan untuk memperkuat hubungan lebih lanjut melalui berbagai cara. Terakhir, JMP, yang ada sejak operasi di Tangguh dimulai dan berlokasi di dekatnya, dilibatkan dalam latihan rutin dan latihan dengan pasukan penjaga keamanan Tangguh untuk memastikan kesiapan tanggap darurat.</p>	<p>Dalam meningkatkan perlindungan dan keselamatan semua area garis pantai dan konstruksi laut, tim keamanan CSTS telah memberikan pelatihan rutin bagi personil yang mengamankan area tersebut.</p> <p>Pelatihan ISPS Code, sosialisasi hukum tentang zona eksklusif, operasi BOF, dan kesadaran mengenai ICBS dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keamanan laut yang juga didukung oleh peningkatan hubungan dengan pangkalan angkatan laut di Sorong dan Polsek terkait lainnya yang dilakukan melalui koordinasi dengan BP.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>10. Prosedur respon cepat di lokasi untuk skenario ancaman keamanan tingkat tinggi harus dapat dibedakan secara jelas dari prosedur yang digunakan untuk kebakaran, ledakan atau keadaan darurat keselamatan lainnya, dan tindakan yang direkomendasikan untuk personil harus mencerminkan pose ancaman yang berbeda.</p>	<p>Setuju. Pedoman respon keamanan yang spesifik diberlakukan dan diinformasikan kepada semua anggota tenaga kerja Tangguh. Latihan rutin dilakukan untuk terus memvalidasi kesiapan Tangguh dalam menanggapi berbagai skenario keamanan. Sirene keamanan digunakan untuk mendukung aktivasi dan de-aktivasi proses keamanan tanggap darurat.</p>	<p>Sesuai dengan perjanjian BP dengan Polisi melalui kerangka kerja sama antara SKK Migas dan Polda Papua Barat, setiap bulan Polda Papua Barat menugaskan 14 petugas polisi (QRF) yang bertanggung jawab untuk merespons atau menangani ancaman keamanan tingkat tinggi yang terjadi di Tangguh LNG. Implementasi perjanjian ini dimulai pada 2018. Namun, BP juga memberdayakan QRF untuk beberapa penugasan rutin seperti patrol, tugas di pos terluar di log pond dan perairan terluar.</p>
<p>11. Tindakan mitigasi kendaraan (Hostile Vehicle Mitigation "HVM") harus ditingkatkan. Mengamankan penyimpanan kendaraan, kunci, atau perangkat pengapian lainnya, sangatlah penting. BP juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan kepraktisan memasang gubernur atau perangkat lain, kecuali kendaraan darurat, yang membatasi kecepatan tertinggi mereka dengan kecepatan rendah yang dibutuhkan oleh kendaraan di lokasi.</p>	<p>Setuju. Penilaian keamanan untuk risiko kendaraan yang berseteru sedang berlangsung. Hasil penilaian ini akan menentukan rencana perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi risiko serendah mungkin.</p>	<p>Ada beberapa workshop yang dilakukan BP mengenai HVM dan hasilnya telah berkontribusi dalam pembuatan asesmen keamanan terhadap risiko kendaraan bertabrakan. Meanwhile, Tangguh LNG cultivates a certain speed in driving based on BP policy. Sementara itu, kecepatan tertentu dalam berkendara telah ditetapkan sesuai kebijakan BP.</p>
<p>12. Pelatihan tahunan bersama dengan polisi dan TNI yang dipersyaratkan dalam JUKLAP harus diadakan setiap tahun, dan harus memvalidasi kemampuan BP untuk mengurangi ancaman keamanan tingkat tinggi. Latihan tersebut harus melatih tanggapan yang terkoordinasi, melibatkan keamanan Tangguh dan CSTS, serta polisi dan TNI. Ini harus dijadikan tambahan dalam latihan tahunan yang diperlukan dan dilakukan tanpa keamanan publik dalam rencana keamanan CSTS.</p>	<p>Setuju. Semua upaya akan dibuat untuk memastikan bahwa pelatihan gabungan secara tahunan tetap dilakukan. Pelatihan tersebut terus memvalidasi kesiapan Tangguh untuk mengelola berbagai skenario ancaman, termasuk kekerasan di tempat kerja, serangan bersenjata, penyanderaan, dan kerusakan dan kekerasan kerja sipil.</p>	<p>Tim sekuriti BP bersama dengan tim sekuriti TEP secara konsisten melakukan latihan bersama setiap tahun bekerjasama dengan Polda Papua Barat, Polres Bintuni, Polsek Babo dan Polsek Aranday.</p> <p>Dalam dua tahun terakhir, latihan bersama menggunakan scenario ancaman terkait TEP termasuk kekerasan oleh masyarakat sipil dan tenaga kerja.</p>
<p>13. BP harus mendukung konferensi reguler yang dipimpin oleh SKKMigas di antara kontraktor minyak dan gas dan profesional keamanan untuk membandingkan ancaman keamanan dan prosedur penanganan dan berbagi praktik.</p>	<p>Setuju. BP adalah peserta reguler konferensi keamanan yang diadakan atau didukung oleh SKK Migas, serta rapat bulanan jaringan manajer keamanan. Opini BP sangat dicari oleh rekan industri dan instansi pemerintah lainnya mengenai pelajaran yang dipetik di ICBS dan VPSHR. Selain itu, BP secara aktif melibatkan BNPT (badan anti</p>	<p>BP secara rutin berpartisipasi dalam konferensi yang dilakukan atau didukung oleh SKK MIGAS.</p> <p>Pada bulan Juni 2019, BP diminta untuk menyampaikan presentasi mengenai ICBS dan VPHSR di konferensi keamanan yang dilakukan oleh SKKMIGAS pusat. Lebih lanjut, BP akan memimpin tim panitia pelaksana Security Summit SKKMIGAS tahun 2020.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
	<p>terorisme nasional) untuk mencari perspektif tentang bagaimana hal itu dapat terus memperkuat penghalangnya terhadap ancaman keamanan tingkat tinggi.</p>	
<p>14. Kapasitas keamanan Tangguh harus ditingkatkan dengan senjata yang lebih efektif untuk menggagalkan serangan jika tidak mengatasi serangan bersenjata. Senjata tidak mematikan, seperti senapan gel lada, semprotan merica, peluru karet, senjata api dan mungkin perangkat lain harus tersedia di tingkat elite penjaga senior yang telah menunjukkan kapasitas mereka dan telah dilatih dengan seksama dalam penggunaannya. BP harus bekerja sama dengan kontraktor keamanan untuk membentuk kader penjaga keamanan elit, yang bisa menjadi promosi bagi para penjaga dengan kinerja terbaik. Jika kontrak yang ada tidak mengizinkan peningkatan kapasitas atau struktur pasukan keamanan ini, maka kontrak tersebut harus didiskusikan dengan kontraktor keamanan sebagai amandemen terhadap kontrak yang ada.</p>	<p>Setuju. Staf keamanan Tangguh dilengkapi dengan tindakan keamanan tambahan dan kapabilitas untuk merespons ancaman keamanan tingkat tinggi. Sejalan dengan itu, unit pasukan penjaga elit Tangguh yang didirikan pada tahun 2012, secara rutin dilatih dan melakukan pelatihan dengan polisi di dekatnya, JMP.</p>	<p>Sesuai dengan asesmen yang dilakukan oleh Tangguh LNG sesuai dengan masukan dari Dabinmas Polda Papua Barat, senjata tidak mematikan tidak boleh digunakan karena dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dengan pertimbangan hal tersebut, sampai saat ini BP tidak menggunakan senjata tersebut. Dan, Tim SRT telah secara konsisten berpartisipasi dalam pelatihan dan ujicoba untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam melakukan tanggung jawab sebagai keamanan yang bekerjasama dengan QRF jika ada ancaman pada tingkat tinggi.</p>

E. Restorasi rumah di pesisir utara

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>1. BP harus secara aktif terlibat dengan pejabat daerah dan nasional dalam upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. BP harus melibatkan pejabat senior Pemerintah Indonesia, termasuk jika memungkinkan Kantor Presiden, meminta bantuan mereka untuk menengahi dan menegosiasikan solusi yang cepat. BP dapat mengusulkan alternatif, seperti menerapkan program secara bertahap, yang memungkinkan diskusi mengenai cakupan program yang tepat saat konstruksi berlangsung.</p>	<p>Kemajuan signifikan telah dicapai pada proyek NSH dalam dua bulan terakhir, mengikuti kunjungan TIAP pada bulan September. Bupati Teluk Bintuni mengeluarkan surat yang mengizinkan dimulainya kembali proyek NSH pada tanggal 6 Desember 2017. Selain itu, BP dan pemerintah daerah Bintuni menandatangani amandemen kesepakatan kerjasama untuk proyek NSH agar mencerminkan fase rehabilitasi (konstruksi) multi-tahun baru, yang tetap sesuai dengan garis waktu TEP, serta dimasukkannya Taroi sebagai kabupaten baru untuk pembangunan 2018. Pada bulan Desember 2017, pemerintah daerah Teluk Bintuni memulai proses tender pembangunan rumah di tiga kabupaten (Weriagar, Tomu dan Taroi). Pembangunan rumah tersebut akan selesai pada 2020, sesuai kesepakatan kerja sama.</p>	<p>Masih berlanjut. Setelah lama tertunda, kegiatan restorasi rumah wilayah utara berlanjut dengan konstruksi pertama dilakukan di Weriagar pada 23 Mei 2018. Namun, karena adanya berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh kontraktor, tidak ada satupun dari 183 target rumah yang selesai sampai Desember 2018. Proses pelelangan ulang dilakukan di 2019 oleh pemda setempat untuk melanjutkan proses pembangunan. Diharapkan paling tidak ada 14 rumah selesai pada akhir tahun 2019.</p> <p>Menghadapi berbagai kompleksitas dari program NSH dan untuk mengelola harapan dari masyarakat, pada bulan Juni 2019 BP melakukan perubahan manajemen dalam melaksanakan program. Tim NSH yang baru melanjutkan proses engagement kepada pemda dan SKKMIGAS untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi program serta mengusulkan strategi dan pendekatan baru untuk mempercepat penyelesaian program.</p>
<p>2. Jika penundaan berlanjut sampai 2018, BP harus meminta otoritas dari SKKMigas untuk mendanai pembangunan beberapa perbaikan infrastruktur yang dipilih oleh masing-masing desa, seperti jembatan baru, bangunan umum atau jalan setapak, sebagai demonstrasi niat baik BP dan sebagai bentuk kompensasi untuk penundaan.</p>		
<p>3. Setiap pelaksanaan program dimulai, BP harus berusaha keras untuk mempercepat jalur waktu demi menyelesaikan setidaknya fase yang direncanakan pada tahun 2020, bertepatan dengan pembukaan Kilang 3.</p>		

F. Listrik

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>1. BP harus bekerja sama dengan para pemimpin di tingkat nasional, termasuk SKKMigas, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ("KPPIP") dan yang lainnya untuk mendorong PLN membuat kemajuan dalam tujuan penting ini. BP juga harus berusaha melibatkan Presiden dan penasihatnya dari Papua dalam usaha ini.</p>	<p>Setuju. Kami akan terus melibatkan pemangku kepentingan utama di tingkat nasional untuk terus memastikan implementasi atas program kelistrikan oleh PLN.</p>	<p>Kami terus melakukan engagement dengan pemerintah di semua tingkat untuk mendapatkan dukungan pengemabngan infrastruktur yang diperlukan untuk program listrik khususnya di wilayah Bintuni. Namun sayangnya, PLN dan pemerintah daerah setempat memiliki prioritas yang berbeda. Mereka saat ini masih memfokuskan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel di Bintuni untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota Bintuni.</p>
<p>2. BP harus meminta wewenang untuk meningkatkan pasokan pembangkit listrik tenaga diesel untuk Babo, sampai PLN memperluas daya berbasis grid dari Tangguh ke Babo dan desa-desa sekitarnya. Hal ini juga harus meminta otoritas untuk menyediakan lampu solar ke setiap rumah tangga di desa-desa tanpa listrik, sehingga tetangga Tangguh dapat memiliki cahaya yang dapat diandalkan.</p>	<p>Setuju. Kami melanjutkan perjanjian kami dengan PLN Teluk Bintuni untuk memenuhi permintaan listrik di Babo. Pada saat bersamaan, kami juga menyediakan generator tambahan untuk mengoptimalkan pasokan listrik bagi masyarakat Babo.</p>	<p>Kami terus memberikan dukungan dalam pemenuhan listrik di Babo dengan meminjamkan generator kami kepada PLN. Namun demikian, mengingat kebutuhan listrik di Babo sangat cukup besar, kapasitas generator tidak cukup. Sehingga menyebabkan generator mengalami berbagai masalah.</p>

G. Gas to power

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>BP harus bekerja lebih aktif dengan Gubernur, pimpinan DPRD, dan pejabat di Jakarta untuk memastikan mereka memahami secara penuh kebutuhan akan tindakan cepat untuk membentuk dan melaksanakan BUMD, yang merupakan prasyarat dalam memulai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kekuatan berbasis gas.</p>	<p>Setuju. BUMD Baru (PT Papua Global Energi) telah dibentuk, namun, Gubernur Papua Barat memutuskan untuk menggunakan BUMD lama (PT Papua Doberai Mandiri atau 'Padoma') demi kesederhanaan, karena BUMD baru memiliki persyaratan tambahan dari parlemen local yang tidak diperlukan. SKK Migas juga telah menulis surat kepada BP agar lanjut dengan Padoma. Langkah selanjutnya bagi Padoma adalah mencari mitra bisnis, melakukan uji kelayakan, melaksanakan MOU, dan kemudian, sebelum kesepakatan, menerapkan perjanjian jual beli. BP dan SKK Migas, berkoordinasi dengan KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dan PLN, akan terus mendukung program gas untuk listrik di Papua Barat.</p>	<p>Ada beberapa perkembangan baik yang dicapai dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program gas to power antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses <i>due diligence</i> untuk PT PGNE (BUMD baru) oleh UGM hampir selesai, menunggu masukan dari Pemda Provinsi Papua Barat. - Kajian lainnya masih berlangsung melibatkan UGM untuk mengakomodir kemitraan antara provinsi dan dua kabupaten (Teluk Bintuni dan Fakfak) dalam pengelolaan alokasi LNG. Jika tidak ada isu, SKKMIGAS akan menerbitkan rekomendasi untuk BP untuk pengembangan perjanjian kerjasama penjualan (MOU) dengan PT PGNE. - PLN dan Pertamina menandatangani perjanjian kerjasama (HOA) pada tanggal 27 Februari 2020, dimana Pertamina akan menjadi pensuplai LNG dan akan bertanggung jawab untuk pembangunan fasilitas penerima LNG di 52 pembangkit listrik PLN (termasuk di 5 lokasi dalam ruang lingkup program Gas to Power), Pertamina kemudian menunjuk PGN (perusahaan Gas Negara), salahsatu dari anak perusahaan Pertamina, untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan komitmen ini ke PLN. - PGN berencana untuk melaksanakan komitmen mereka, dalam 4 tahapan yang dibagi berdasarkan lokasi. Tahap pertama akan dimulai di 2020 untuk 5 lokasi dimana dua diantaranya ada dalam ruang lingkup program Gas to Power. Target penyelesaian dari 4 tahapan ini adalah 2022 (2 tahun). Saat ini, proses pelelangan untuk membangun fasilitas tersebut masih berlangsung. - Tangguh akan terus memantau diskusi antara Pertamina, PLN dan PGN serta siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu negosiasi aspek komersial.

H.1.Sosial dan pengembangan masyarakat: Kesehatan

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>1. BP harus terus mendukung program yang mengurangi morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan diare, TB dan HIV/AIDS. Upaya ini harus terus didukung secara aktif dengan tujuan untuk meningkatkan perawatan kesehatan Teluk Bintuni ke standar Indonesia.</p>	<p>Setuju. Kegiatan program kesehatan masyarakat Tangguh, mendukung pemerintah daerah untuk terus memberantas TB, HIV/AIDS dan diare, terutama di desa-desa di sekitar proyek tersebut, agar sesuai dengan pedoman nasional. Mengenai HIV/AIDS, kami mendirikan 18 layanan konseling dan pemeriksaan sukarela (VCT) di wilayah Teluk Bintuni untuk memberikan konseling dan pengujian gratis bagi mereka yang berisiko. Penyedia layanan kesehatan ini mendapat pelatihan standar dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai bagian dari kegiatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kab di Teluk Bintuni. HIV di Tanah Papua dianggap sebagai epidemi populasi umum, program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap pengobatan HIV dan ARV (antiretroviral) untuk masyarakat umum. Pada tahun 2017, lebih dari 6.600 orang di seluruh wilayah Teluk Bintuni berpartisipasi dalam tes HIV termasuk ibu hamil, dan 54 orang yang didiagnosis HIV positif dirujuk untuk pengobatan ARV.</p> <p>Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, program ini memfasilitasi pengembangan kapasitas petugas kesehatan di layanan TB (Puskesmas dan RSUD Bintuni). Program ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan merekrut kader TB di desa-desa untuk mengunjungi penderita TB dan melakukan penyaringan di Puskesmas setempat. Selain itu, program ini melakukan proyek percontohan di beberapa desa yang memiliki prevalensi TB tingkat tinggi pada bulan April 2017. Ini merupakan rekomendasi program nasional untuk optimalisasi kasus intensif yaitu mencari orang yang berisiko terkena TB. Dan, awareness</p>	<p>Program kesehatan masyarakat Tangguh terus mendukung upaya perbaikan kualitas dan akses layanan kesehatan untuk masyarakat disekitar proyek. Program masih difokuskan di 14 kampung, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Yayasan Yatima sebagai mitra pelaksana.</p> <p>Pada bulan November 2019, kontrak Yatima berakhir. Saat ini kami dalam proses merekrutmen mitra pelaksana baru untuk mendukung program kesehatan masyarakat kedepannya.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
	session bulanan tentang gaya hidup sehat yang berfokus pada malaria, TB dan HIV/AIDS menargetkan masyarakat di desa-desa di sekitar proyek Tangguh. Rata-rata, lebih dari 450 orang berpartisipasi setiap bulannya.	

H.2. Sosial dan pengembangan masyarakat: mata pencaharian dan kewirausahaan masyarakat asli

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>2. BP harus bekerja dengan Indocater dan koordinator desa untuk mencapai komitmen AMDAL TEP-nya yaitu mendapatkan 10% kebutuhan pangan segar TEP selama konstruksi dan 65% pasca konstruksi. Peningkatan produksi oleh koperasi ini mungkin memerlukan perluasan stocking point dan / atau pick-up yang lebih sering.</p>	<p>Setuju. BP telah memfasilitasi komunikasi antara perusahaan catering di Site dan pengelolaan koperasi/tempat penimbunan, dengan memperhatikan pesanan komoditas di masa mendatang, sehingga petani dan nelayan dapat melakukan persiapan dan menyusun jadwal panen yang lebih baik untuk menghindari produksi yang berlebihan. Komunikasi semacam itu dilakukan secara berkala melalui mentor teknis kami di desa, yang berlokasi di koperasi/tempat penimbunan. Jika tidak ada perubahan dalam strategi operasional mengenai pelaksanaan penjadwalan, layanan catering Tangguh akan terus mengumpulkan barang-barang komoditas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontraknya dengan koperasi.</p>	<p>Berlanjut. BP terus menjamin agar proyek dapat memenuhi komitmennya untuk menyerap produk makanan dari masyarakat dan memantau secara ketat setiap bulan sekali. Audit yang dilakukan pada bulan September 2019 menyimpulkan bahwa rasio penyerapan dari produk makanan dari masyarakat (hasil pertanian dan perikanan) ke kontraktor catering TEP adalah sekitar 18% atau memenuhi komitmen AMDAL TEP. BP juga terus mendukung untuk memberikan bantuan teknis untuk koperasi sesuai kebutuhan.</p>
<p>3. BP harus melembagakan pemantauan secara cermat terhadap pengadaan lokal oleh kontraktor untuk memastikan bahwa komitmen AMDAL-nya telah dipenuhi dan meminta agar setiap kekurangan segera ditangani. Jika tidak dikoreksi, BP harus mengajukan denda berdasarkan kontrak yang bisa diinvestasikan di fasilitas dan perlengkapan koperasi.</p>	<p>BP akan memperkuat upaya manajemen kinerja secara berkala untuk memantau kinerja kontraktor dan memastikan bahwa komitmen kontraktual disampaikan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.</p> <p>Jika kontraktor gagal dalam menyampaikan komitmennya, BP akan membentuk rencana tindakan kuratif dan, jika perlu, segera mengambil tindakan untuk meminimalisir kekurangan. Rencana kuratif juga bisa mencakup pelaksanaan hukuman, yang akan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.</p>	
<p>4. Kelompok Pengadaan dan Pengadaan Rantai Pasokan BP harus menggali peluang untuk produk atau layanan tambahan yang dapat diberikan oleh masyarakat lokal yang ahli, perusahaan asli yang terlatih. Sejauh ini, satu-satunya kontrak yang telah diberikan kepada peserta</p>	<p>Tim BP terus menilai peluang masyarakat adat agar memungkinkan bisnis lokal terlibat dalam program rantai pasokan proyek Tangguh. Dari bulan Januari sampai Juli 2017, tujuh institusi Papua terlibat dalam bisnis Tangguh,</p>	<p>Kami terus memberikan kesempatan bagi masyarakat asli untuk terlibat dalam rantai pasokan barang baik ke Tangguh operasi maupun TEP.</p>

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
adalah Mayri dan Koperasi Raja Barefal untuk persediaan stasioner dan Subitu Kreasi Busana untuk seragam.	dengan total transaksi senilai lebih dari US\$ 5,8 juta. Sejak 2006, total transaksi dengan 27 bisnis Papua untuk berbagai layanan mencapai sekitar US\$ 186 juta.	Berdasarkan hasil pemantauan data, koperasi saat ini juga mensuplai produk lainnya untuk memenuhi kebutuhan proyek diluar perjanjian kerjasama.
5. Bisnis asli SUBITU merupakan elemen penting pembangunan Papua. Kegagalan salah satu dari bisnis SUBITU akan berdampak buruk pada keseluruhan program pengembangan perusahaan BP. BP harus terus memelihara bisnis ini karena mereka berusaha keras untuk menjadikan perusahaannya menguntungkan.	Setuju. Tim IEDP akan terus memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk mendukung bisnis SUBITU dan melengkapi mereka dengan keterampilan agar dapat berkembang melampaui pasar Tangguh dan Bintuni dan Papua Barat. BP juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah di kabupaten dan di tingkat provinsi agar terus mendapatkan dukungan	Sejak 2016 bisnis SUBITU telah mengembangkan bisnisnya ke Sorong dan Manokwari (Subitu Kreasi Busana dan Pemeliharaan AC). Sebagai bagian dari pengembangan bisnis mereka, kami mendukung mereka untuk mengembagkan Subitu Trans Maritim (STM), yang menyediakan jasa layanan taksi air untuk masyarakat Bintuni. Kami masih akan terus memberikan dukungan untuk menjamin kesinambungan dari usaha SUBITU termasuk pengembangan proyek mereka diluar Bintuni untuk merespon kebutuhan pasar.

H.3. Sosial dan pengembangan masyarakat: Kompensasi adat

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
BP harus terus menolak usulan apapun bahwa BP harus membayar klaim adat yang diakui oleh pemerintah, dan termasuk pembayaran dalam pemulihan biaya. Jika Pemerintah Indonesia menuntut agar BP membayar klaim semacam itu, maka uang tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai atau setara. Jika pembayarannya harus melibatkan BP, maka harus sepenuhnya transparan, dan berbentuk dana untuk program atau program tertentu yang menguntungkan masyarakat adat.	Setuju. Mekanisme pembayaran klaim adat telah disepakati antara SKK Migas dan ESDM. Implementasi skema ini akan dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	BP tetap pada posisinya dan tidak akan melakukan pembayaran secara tunai terkait dengan tuntutan adat. Hal ini juga berlaku untuk seluruh sub-kontraktor BP. Kamia kan merujuk kepada peraturan yang berlaku terkait dengan pembayaran tuntutan adat.

H-4. Sosial dan pengembangan masyarakat: pendidikan

Rekomendasi TIAP dari kunjungan September 2017	Tanggapan BP Januari 2018	Status
<p>Sekolah unggulan adalah satu-satunya unsur dukungan BP yang paling penting bagi pendidikan lokal. Sudah lama tertunda. BP harus bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan mitra pendidikannya untuk membuat pembentukan satu sekolah unggulan tepat waktu di Teluk Bintuni sebagai prioritas. Sekolah harus berfungsi sepenuhnya, paling lambat, saat Kilang 3 beroperasi dimulai.</p>	<p>Pengembangan sekolah unggulan sedang berlangsung. Pada tahun 2017, kegiatan ini fokus pada pengembangan konsep, yang melibatkan konsultan independen dari dua institusi. Kami sedang mengejar setidaknya satu program sekolah unggulan di TMB pada tahun 2020. Pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dan yayasan pendidikan lokal dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan mengenai konsep sekolah unggulan. Kami juga mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti studi perbandingan mengenai bagaimana sekolah unggulan berhasil diimplementasikan di Jayapura, Provinsi Papua, dan di Tomohon, Sulawesi Utara. Tender untuk mitra pelaksana program sekolah unggulan sedang berlangsung dan kami mengharapkan kegiatan-kegiatan berlanjut untuk mendukung pengembangan sekolah unggulan di tahun 2018.</p>	<p>Masih berlanjut. Program sekolah model telah didirikan di Tanah Merah Baru pada bulan Oktober 2018. Perjanjian kerjasama telah ditandatangani BP dan pemda setempat pada bulan Juli 2019 yang menguraikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk mendukung program.</p> <p>Kami merekrut Yayasan Nusantara Sejati (YNS) sebagai mitra pelaksana program pada tahun 2018 untuk tiga tahun penugasan. Dukungan teknis untuk sekolah di TMB berlanjut untuk memastikan sekolah tersebut memenuhi standar sekolah model. Selain itu, Pemda Teluk Bintuni telah memutuskan untuk mengembangkan SMP Santa Monika di Bintuni sebagai sekolah model lainnya. Sekolah ini juga akan mengakomodasi siswa siswi masyarakat asli dari kampung-kampung.</p>